BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat (Waluyo,2011:1). Perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang dinamis, penerapannya harus senantiasa mengikuti dinamika perekonomian, baik domestik maupun internasional (Rosdiana:2006).

Pajak memiliki dua fungsi, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi mengatur (*regulerend*) (Mardiasmo,2003:2). Maka dalam pemungutan pajak bukan hanya ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan momentum pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk menggenjot penerimaan negara. Dengan pajak sebagai salah satu pos penerimaan negara diharapkan banyak pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:25).

Sektor pajak memiliki posisi sangat penting dan strategis bagi pendapatan negara, sehingga hampir tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi negara (Siti Kurnia Rahayu,2010:55). Dalam pelaksanaan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semua aparat penyelenggara negara berkewajiban mengamankan target penerimaan negara dan menyelenggarakan belanja negara dengan bertanggungjawab (Agus Santoso,2011).

Namun dalam beberapa tahun terakhir Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) selalu gagal mencapai target dalam APBN. Oleh sebab itu jika pemerintah ingin mengejar target tersebut, selain pembenahan di Ditjen Pajak maka pemerintah juga harus membuat terobosan yang benar-benar efektif, bukan terobosan yang berupa konsep (Drajad Wibowo,2011).

Setiap tahun Dirjen Pajak dituntut untuk selalu meningkatkan penerimaan dari sektor pajak sejalan dengan meningkatnya kebutuhan dana untuk pembangunan (Rahayu,2007). Sektor perpajakan saat ini memang masih menjadi sumber pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita, meskipun masih banyak sektor lain seperti minyak dan gas bumi, serta bantuan luar negeri.

Komisi XI DPR terus mendesak agar pemerintah menaikkan target penerimaan pajak. Dewan meminta agar pemerintah menggenjot kenaikan *ekstra effort* atau optimalisasi penerimaan pajak (Laurens Bahang Dama,2011). Selain untuk memenuhi target APBN, pemerintah juga bertekad untuk mengurangi utang negara. Data terakhir utang pemerintah sudah mencapai Rp 1.754,91 triliun dengan rasio 27,3% dari Produk Domestik Bruto. Namun pemerintah berjanji menekan rasio utang dengan cara menggenjot penerimaan pajak (Anny Ratnawati,2011).

Namun pemerintah tidak perlu berkecil hati, seiring dengan melesatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia, membuat kekayaan masyarakat juga bertambah. Dengan meningkatnya jumlah kekayaan, maka akan memberikan dampak yang penting bagi negara,salah satunya penerimaan pajak yang akan

bertambah (Fauzi Ichsan:2011). Potensi ini bisa bertambah lagi apabila jika pemerintah memberlakukan pengenaan pajak yang lebih tinggi bagi orang-orang kaya,yang tentunya bisa memberikan kontribusi lebih besar ke negara (Warren Buffet,2011).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar penerimaan pajak bisa optimal, yaitu:

1. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan Perpajakan;
2. Tingkat Intelektual Masyarakat;
3. Kualitas Petugas Pajak (Intelektual, Keterampilan, Integritas dan Moral Tinggi);
4. Sistem Administrasi Perpajakan yang Tepat

(Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu,2006:26)

Pemerintah harus terus-menerus melakukan perubahan dan perbaikan yang bertujuan agar penerimaan pajak bisa meningkat dan dimanfaatkan oleh rakyat.

Selain faktor-faktor penerimaan pajak yang harus diperhatikan pemerintah,adapula potensi pajak yang bisa dimaksimalkan oleh negara. Sesuai pengenaannya, menurut Mardiasmo (2003:46) pajak dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak negara terdiri dari:

a. Pajak penghasilan
b. Pajak pertambahan nilai dan pajak penyetoran atas barang mewah
c. Bea materai
d. Pajak bumi dan bangunan

Sedangkan pajak daerah terdiri dari:

a. Pajak provinsi, meliputi:
    1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
    2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air
    3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
    4. Pajak pengembalian dan pemanfaatan air bawah tanah dan air Permukaan
b. Pajak kabupaten/kota, meliputi:
    1. Pajak hotel
    2. Pajak restaurant
    3. Pajak hiburan
    4. Pajak reklame
    5. Pajak penerangan jalan'pajak pengambilan bahan bakar golongan C

Bila dilihat dari sisi subjek pajak, juga masih banyak potensi pajak yang bisa diterima, menurut Waluyo (2011:58) diantaranya:

1. Subjek pajak orang pribadi
2. Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
3. Subjek pajak badan
4. Subjek pajak bentuk usaha tetap

Namun saat ini baru sekitar 8,5 juta orang pribadi yang menyerahkan SPT dari potensinya 44 juta orang. Sementara untuk badan usaha, baru 466 ribu badan usaha yang tercatat sebagai pembayar pajak dari potensi 12,9 juta badan usaha yang memiliki domisili tetap maupun tidak (Agus Martowardojo,2011). Jika

dilihat dari jumlahnya, tentu saja sangat mencengangkan, padahal negara sangat membutuhkan penerimaan pajak untuk kepentingan rakyat itu sendiri.

Pemerintah coba mengatasi masalah itu. Direktorat Jenderal (Ditjen Pajak) bakal melakukan sensus pajak pada akhir September 2011 ini. Alasan utamanya adalah karena masih banyaknya wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang belum memenuhi kewajiban pajaknya (Fuad Rahmany,2011). Badan Pusat Statistik (BPS) siap melakukan sensus pajak, untuk mengetahui potensi pajak sebenarnya di luar data kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimiliki Ditjen Pajak. Sensus pajak intinya sebenarnya adalah untuk melihat berapa potensi dari pajak negara. Sensus pajak ini sangat penting, agar pihak Ditjen Pajak dapat melakukan ekstensifikan dalam pemungutan penerimaan negara melalui pajak (Rusman Heriawan,2011). Rencana yang diusulkan oleh pemerintah sudah cukup baik. Selain itu,ada cara lain yang bisa dilakukan pemerintah, yaitu dengan menjalankan sistem online. Apabila sistem online dijalankan penerimaan pajak akan mencapai tiga kali lipat (Djan Faridz,2010).

Semua upaya untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak tidak akan berarti apabila pemerintah tidak memberi contoh kepada masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mengungkapkan masih ada sekitar 240 orang pegawainya yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Ditjen Pajak mengklaim masih ada pegawainya yang belum melaporkan dikarenakan berbagai faktor seperti sedang cuti, dinas luar negeri, dan melakukan studi (Liberti Pandiangan,2011). Hal ini sangat disayangkan karena pemerintah sendiri sedang gencar-gencarnya melakukan usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Pemerintah tentunya tak menginginkan kepercayaan masyarakat kepada Ditjen menurun. Salah satu upaya yang harus dilakukan pihak Direktorat Jenderal Pajak yaitu keterbukaan bagi BPK untuk melakukan audit terhadap basis data penerimaan pajak di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tersebut (Anwar Nasution,2010). Selain itu kedekatan dengan masyarakat juga diperlukan. Komunikasi pengusaha dengan Dirjen pajak sangat penting. Apalagi sampai saat ini masih ada sebagian pengusaha yang belum bayar pajak, namun disisi lain ada juga yang patuh membayar pajak (Sofjan Wanandi,2011). Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial diantara Wajib Pajak.

Salah satu jenis pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah Pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) mempunyai peranan yang besar dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan memberikan dampak yang besar bagi perekonomian rakyat Indonesia, karena seluruh orang Indonesia atau yang dianggap secara hukum menjadi orang Indonesia yang ikut serta dalam perdagangan kecil-kecilan atau eceran baik untuk dirinya sendiri maupun untuk pihak lain merupakan subjek dari pajak penghasilan (Siti Kurnia Rahayu,2010:16). Pajak Penghasilan dapat pula dikenakan terhadap badan yang memperoleh penghasilan di Indonesia, salah satunya Bank.

Menurut *Account Representative* Kantor Pelayanan Pajak Pratama sumedang, mengemukakan bahwa tidak semua Wajib Pajak Bank membayar angsuran pajak pembayarannya meningkat dan tidak stabil setiap masa pajak. Padahal pemerintah mengharapkan penerimaan pajak terus bertambah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menuangkan pembahasan tersebut dalam laporan Praktik Kerja Lapangan dengan judul **"TINJAUAN ATAS PROSEDUR PENETAPAN ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 WAJIB PAJAK BADAN YANG BERGERAK DI BIDANG PERBANKAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Mengumpulkan data dan informasi terkait dengan Prosedur Penetapan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Badan yang bergerak di bidang perbankan.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun tujuan yang dicapai dari laporan kuliah kerja praktek ini adalah Untuk mengetahui prosedur penetapan angsuran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak badan yang bergerak di bidang perbankan pada KPP Pratama Sumedang.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

1. Bagi Penulis

   Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta menjadi informasi tentang

bagaimana prosedur penetapan angsuran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak bank pada KPP Pratama Sumedang.

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang

   Sebagai masukan untuk mengevaluasi penetapan angsuran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak bank pada KPP Pratama Sumedang.

3. Bagi Pihak Lain

   Dapat dijadikan sebagai bahan informasi mengenai penetapan angsuran pajak penghasilan pasal 25 wajib pajak bank pada KPP Pratama Sumedang, selain itu, hasil laporan kerja praktek ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi penelitian yang mengkaji judul yang sama.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyusunan laporan ini adalah menggunakan metode *deskriptif*, yaitu metode yang digunakan dengan jalan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasikan dan menganalisis data. Artinya penelitian yang bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan keadaan riil tertama dengan masalah yang dibahas, kemudian dianalisis untuk ditarik kesimpulan.

Adapun teknik dalam pengumpulan data dan informasi sebagai materi pendukung dalam penyajian laporan ini adalah :

1. Studi Kepustakaan (*library research*)

   Studi Kepustakaan (*library research*) yaitu merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari, meneliti dan menelaah berbagai macam bahan bacaan yang ada di perpustakaan, baik buku – buku, diktat dan bahan – bahan lain yang ditulis dan disusun oleh beberapa Penulis yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas. Juga catatan – catatan pribadi yang pernah didapat selama mengikuti perkuliahan.

2. Studi Lapangan (*Field Research*)

   Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian. Penelitian yang dilakukan dengan metode pengambilan data yang tersedia dilapangan yaitu:

   a. Pengamatan (*Observation*)

      Penulis melakukan pengamatan secara langsung, mempelajari, dan melakukan pencatatan secara sistematis terhadap kegiatan – kegiatan mengenai masalah yang akan Penulis bahas.

   b. Wawancara (*Interview*)

      Penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara tanya – jawab sepihak dengan para pegawai atau petugas yang bertanggungjawab dengan perusahaan tersebut dan dikerjakan dengan sistematik dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

1.5.1 Lokasi Kerja Praktek

Penulis melakukan Kerja Praktek di KPP Pratama Sumedang yang berlokasi di JL. H. Ibrahim Adjie No. 372 Bandung. Telepon : 022-7333256, 7333225 Faksimile : 022-7337086.

1.5.2 Waktu Kerja Praktek

Waktu Kerja Praktek dilaksanakan mulai dari tanggal 4 Juli 2011 sampai dengam Desember 2011. Berikut ini adalah aktivitas kerja praktek dan aktivitas pada KPP Pratama Sumedang.

Tabel 1.1
Jadwal Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Kegiatan	Mei	Juni				Juli				Agus				Sept				Okt				Nov				Des			
		2011	2011				2011				2011				2011				2011				2011				2011			
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	**Tahap Persiapan Kerja Praktek**																													
	1. Mengambil Surat Izin Kerja Praktek	■																												
	2. Mencari Tempat Kerja Praktek	■																												
	3. Pengajuan Kerja Praktek ke Instansi	■																												
	4. Persetujuan Kerja Praktek		■																											
	5. Mendapat Absen untuk KP			■																										
2.	**Pelaksanaan Kerja Praktek**																													
	1. Registrasi				■																									
	2. Kerja Praktek						■	■	■	■																				
	3. Selesai KP									■																				
3.	**Pelaporan Kerja Praktek**																													
	1. Pengajuan Judul																			■										
	2. Mulai Bimbingan Kerja Praktek dengan Dosen Pembimbing																								■	■	■			
	3. Revisi																									■				
	4. Pengumpulan Data																													
	5. Ujian Kerja Praktek																													
	6. Pengumpulan Laporan Kerja Praktek																													